

BAGAIMANA PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA ORGANISASI KEAGAMAAN? (STUDI KASUS PADA GEREJA TORAJA JEMAAT KASIMPO)

Novrianto Patawaran¹, Mitha Restuti²

^{1,2}Fakultas Ekonomika & Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

e-mail: novriantopatawaran@gmail.com¹, mitha.restuti@uksw.edu²

Diterima: 14-07-2023 Disetujui: 08-08-2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* yang diterapkan di Gereja Toraja Jemaat Kasimpo. Istilah *Good Church Governance* (GCG) digunakan untuk melihat penerapan tata kelola pada gereja sebagai implikasi dari pedoman *Good Governance*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara bersama Badan Pekerja Majelis dan perwakilan jemaat, observasi program dan kegiatan gereja, serta dokumentasi data. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG yang diterapkan pada Gereja Toraja Jemaat Kasimpo meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan sudah berjalan dengan baik dan hampir memenuhi berdasarkan indikator yang telah dibuat dari implikasi konsep *Good Governance*. Namun pada indikator prinsip akuntabilitas yaitu pengelolaan keuangan belum sesuai dengan pedoman Gereja Toraja dan prinsip *Independency* terkait integritas kerja belum memenuhi.

Kata kunci: *Good Governance, Good Church Governance, Pemangku Kepentingan, Gereja Toraja*

Abstract

This study aims to find out and to see how the application of the Good Governance principles that applied in the Gereja Toraja case study in Gereja Toraja Jemaat Kasimpo. Good Church Governance (GCG) used to see the application of governance in church as the implication of Good Governance guidance. This research used a qualitative method with a descriptive approach. This research used primary and secondary data which is obtained by the Council Board and the representation of the church, programme observation and Church activities, and also data documentation. The analytical method used the data reduction, data presentation and conclusion. The results of the study show that the application of the GCG principles that applied in Gereja Toraja Jemaat Kasimpo covering transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness has been going well and almost fulfilled the Good Governance indicators. However, the accountability indicator that is financial management is not suitable enough with the Gereja Toraja guidance and the independency indicator related to work integrity is not fulfilled.

Keywords: *Good Governance, Good Church Governance, Gereja Toraja*

Pendahuluan

Kasus penyalahgunaan dana lima tahun terakhir yang terjadi pada beberapa gereja di Indonesia kian menarik perhatian. Baru-baru ini saja negara dirugikan 21,6 miliar atas tindak korupsi dana pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 yang melibatkan Bupati Kabupaten Mimika (Kamil, 2022). Begitupun kasir gereja yang terlibat dalam kasus penggelapan dana milik gereja sebesar 289 juta didapat setelah dilakukannya *cash opname* oleh badan keuangan Gereja GPIB Maranatha Denpasar (Arri, 2021). Selain itu, sebelumnya juga pernah terjadi kasus serupa pada tahun 2018 dan 2019 yang didalamnya melibatkan seorang Pendeta. Pada tahun 2018, seorang Pendeta dituding melakukan penggelapan uang pembangunan di Gereja Imanuel Tomalehu Timur dikarenakan pertanggungjawaban anggaran tidak pernah transparan (kabartimur, 2018). Sedangkan pada tahun 2019 terjadi kasus Pendeta dipenjarakan karena dugaan penggelapan dana ganti rugi lahan gereja di Entikong, Kalimantan Barat (Putra, 2019). Semakin bertambahnya kasus penggelapan dana yang terjadi di beberapa gereja di Indonesia mengindikasikan adanya sistem tata kelola pada gereja yang kurang baik.

Gereja pada umumnya sering mengalami permasalahan transparansi dan akuntabilitas dikarenakan jemaat ada yang enggan untuk mencantumkan namanya jika informasi keuangan dipublikasikan. Seperti halnya pada wawancara yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan beberapa jemaat menyatakan adanya permasalahan transparansi dan akuntabilitas pelaporan informasi keuangan di Gereja Toraja ABC (Tjungadi & Rahadian, 2020). Padahal gereja pun perlu bertanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan Gereja dalam bentuk laporan keuangan kepada pemerintah dan Jemaatnya (Gabriela Mony & Suhartini, 2022). Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi organisasi nirlaba atau nonprofit, hal ini tentunya akan berdampak baik atau buruknya penilaian masyarakat terhadap organisasi nirlaba khususnya gereja (Suhendri & Iriani, 2021). Prinsip akuntabilitas dapat berdampak baik sebagai contoh pada jemaat HKBP Bandar Khalipah bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan minat jemaat untuk memberikan sumbangan kepada gereja (Munte & Dongoran, 2019).

Menurut Prodjowijono (2008) bahwa untuk dapat mengelola suatu gereja dengan baik, pengelola harus mengerti dan memahami tugas dan fungsi serta kewenangan dalam menjalankan visi dan misi gereja guna mewujudkan apa yang sudah ditetapkan baik visi, misi, strategi, program. Hal ini dimaksudkan agar proses perjalanan pengelola gereja itu dapat selalu konsisten di jalur yang benar (Angin & Yeniretnowati, 2022). Tata kelola organisasi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Dewasa ini tidak hanya praktisi pemerintahan dan korporasi saja yang menerapkan prinsip *good governance*, namun organisasi nirlaba juga dituntut untuk menjadi organisasi yang profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* (Qomariyah & Sulistyowati, 2022). Implementasi tata kelola yang efektif dan efisien tidak hanya sebatas pada lingkungan organisasi profit dan pemerintahan saja tetapi berlaku juga pada organisasi non profit lainnya seperti Gereja (Muslih et al., 2021). Gereja merupakan salah satu bentuk entitas berorientasi non profit dalam bidang keagamaan dan berbadan hukum karena memenuhi syarat yaitu memiliki harta kekayaan sendiri, memiliki pengurus dan anggota jemaat serta mempunyai usaha untuk tujuan tertentu yaitu keagamaan, untuk itulah gereja harus memperhatikan tata kelolanya (Maria et al., 2022). *Good corporate governance* menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam organisasi gereja secara khusus dalam lingkup Gereja Toraja agar dapat mewujudkan Tri Panggilan Gereja yaitu Bersaksi, Bersekutu, Melayani (Londong, 2019).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh pihak internal maupun eksternal untuk mengatur, mengawasi, dan menyeimbangkan pola hubungan antara pemilik dan *stakeholder* sehingga GCG tidak hanya diterapkan oleh organisasi profit, tetapi diterapkan juga pada organisasi nirlaba (Meriani &

Wenny, 2018). Hal ini ada tertulis dalam Pedoman Umum GCG Indonesia, yaitu pada poin keempat latar belakang yang mengatakan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan GCG, Pemerintah juga semakin menyadari perlunya penerapan *good corporate governance* di Sektor Publik (KNKG, 2006). Organisasi Gereja adalah salah satu organisasi publik non pemerintah pada bidang keagamaan (Kedoh & Sulindawati, 2022). Menurut Kustina & Sujana (2019) menyatakan bahwa konteks *good governance* didefinisikan sebagai suatu proses, struktur, tata kelola yang digunakan oleh seluruh struktural organ perusahaan. Tiga unsur dalam mengelola tata kelola yang baik yakni struktur, mekanisme, dan prinsip tata kelola (Muslih et al., 2021). Pertama, gagasan tentang bagaimana hubungan antara prinsip tata kelola dapat dibagi, dijalankan, dan dikendalikan disebut struktur tata kelola. Kedua, mekanisme tata kelola adalah alat penting untuk memfasilitasi komunikasi antara pembuat keputusan, pelaksana keputusan, dan pemantau keputusan. Ketiga, prinsip-prinsip tata kelola meliputi *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*. Ketiga unsur tersebut menjadi satu kesatuan dan saling berkaitan, sehingga penerapannya perlu di perhatikan pada gereja. *Good governance* menuntut adanya perubahan paradigma berpikir dan bertindak bagi semua elemen sektor publik untuk menghasilkan suatu manajemen keuangan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan efektif yang mendukung peningkatan peran serta masyarakat dan supremasi hukum di bidang keuangan dan meningkatkan kinerja organisasi (Qomariyah & Sulistyowati, 2022).

Pertama prinsip transparansi bertujuan agar organisasi dapat memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan diakses dengan mudah serta dapat dipertanggungjawabkan oleh para pemangku kepentingan (Sudarmanto et al., 2021). Kedua, akuntabilitas adalah kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan atas kegiatan atau aktivitas yang telah dilakukan, serta peraturan pengelolaan dana yang harus dipatuhi (Dzulrifli et al., 2023). Akuntabilitas berdasarkan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Verifikasi Gereja Toraja Tahun 2019 diarahkan pada *cross accountability*, yaitu akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas vertikal (Badan Pekerja Sinode, 2019). Ketiga, pertanggungjawaban adalah prinsip yang dapat diterapkan dengan membuat laporan atas pelaksanaan kegiatan, program kerja yang sudah dijalankan khususnya di lingkungan gereja (Girsang, 2022). Keempat, *independency* adalah prinsip yang dapat diwujudkan dengan tidak adanya pendorongan dalam jabatan dan tidak diintervensi oleh pihak lain (Gabriela Mony & Suhartini, 2022). Kelima, kewajaran adalah bentuk dari organisasi dalam memperhatikan kepentingan para pemangku secara adil dan setara satu dengan lainnya (Burhan & Jamaluddin, 2020). Oleh karena itu kelima prinsip ini akan menjadi dasar dalam penelitian untuk menyelidiki bagaimana penerapannya pada Gereja Toraja Jemaat Kasimpo.

Teori *stakeholder* merupakan hal yang penting dalam *good governance* pada gereja karena teori ini harus bisa memberikan manfaat penerapan *good governance* sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para *stakeholders*. *Stakeholders* dalam organisasi terdiri dari individu-individu dan kelompok yang diharapkan oleh sebuah organisasi dapat mewujudkan tujuan organisasi untuk pertumbuhan dan kelangsungan organisasi. *Stakeholders* dalam kehidupan gereja terdiri dari Pendeta, Majelis Gereja, Jemaat atau individu lainnya. Definisi teori *stakeholder* menurut Freeman et al. (2010) adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Suatu organisasi dijalankan tidak hanya untuk kepentingan organisasinya, namun juga diharapkan dapat mampu memberikan manfaat dan berkontribusi kepada *stakeholder*-nya (Pistea et al., 2020). Teori *stakeholder* bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi aktivitas gereja dalam mengatur upaya peningkatan penciptaan nilai dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalisir kerugian yang bisa terjadi bagi para *stakeholder*.

Penelitian mengenai penerapan *good governance* pada organisasi profit sudah banyak dilakukan, tetapi penelitian yang dilakukan pada organisasi nonprofit khususnya keagamaan

seperti gereja masih terbatas. Gereja sebagai salah satu tempat ibadah umat beragama juga perlu untuk menerapkan sebuah tata kelola yang baik, namun penerapan tata kelola yang baik dalam sebuah organisasi nirlaba termasuk gereja masih kurang disadari dan sering diabaikan (Halim, 2020). Menurut Karina Dewi (2017) Gereja belum menerapkan tata kelola yang baik karena panduan yang digunakan lebih menekankan ke arah nilai religius dan belum mengarah kepada persoalan tata kelola secara holistic. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena dan analisis gap dari beberapa sumber penelitian terdahulu gereja penting dapat menerapkan *good governance* sebagai bentuk pengendalian internal dalam mewujudkan visi dan misi pelayanan yang hendak dicapai. Fokus dalam penelitian ini tidak hanya untuk menilai penerapan *good governance* yang terdapat dalam gereja saja, namun juga menemukan indikator prinsip *good governance* sesuai pedoman yang dapat diidentifikasi dalam gereja.

Istilah *good church governance* yang dipakai dalam penelitian ini diartikan sebagai implikasi dari unsur yang terdapat di dalam konsep *good governance* untuk menggambarkan tata kelola yang baik pada gereja. Penelitian ini akan dilakukan dengan studi kasus di Gereja Toraja Jemaat Kasimpo. Objek ini dipilih didasarkan karena adanya indikasi penerapan tata kelola yang kurang baik pada saat melakukan validasi laporan pertanggungjawaban anggaran kegiatan gereja serta adanya proses verifikasi dan transparansi yang dilakukan secara berkala kepada jemaat pada beberapa Gereja Toraja yang pernah didatangi. Ketiga alasan tersebut menimbulkan keingintahuan peneliti untuk dapat menelaah lebih dalam terkait penerapan *good church governance* pada Gereja Toraja. Oleh sebab itu, penelitian ini dapat menjawab beberapa persoalan penelitian (1) Indikator seperti apa yang dapat diterapkan untuk menggambarkan prinsip-prinsip *good church governance* dan (2) Bagaimana penerapan prinsip tersebut dalam organisasi nirlaba khususnya pada Gereja Toraja Jemaat Kasimpo. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menggambarkan bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Gereja Toraja Jemaat Kasimpo. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Gereja Toraja Jemaat Kasimpo sebagai pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja gereja sejauh ini. Secara khusus, gereja dapat memahami dan meningkatkan penerapan unsur-unsur *good governance* pada gereja sehingga dapat menciptakan kinerja yang berkualitas dan fungsi gereja sebagai tempat persekutuan orang percaya akan menjadi optimal. Bagi jemaat, dengan adanya penerapan *good governance* pada Gereja Toraja Jemaat Kasimpo dapat meningkatkan loyalitas jemaat kepada gereja. Penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi para akademisi untuk menjadi bahan referensi mengenai penerapan tata kelola yang baik pada gereja.

METODE

Definisi operasional berdasarkan pedoman prinsip transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, *independency* dan *fairness* sesuai dengan kajian literatur *good governance*, indikator *Good Church Governance* yang dapat diperhatikan dalam pengelolaan gereja adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Indikator Prinsip *Good Church Governance*

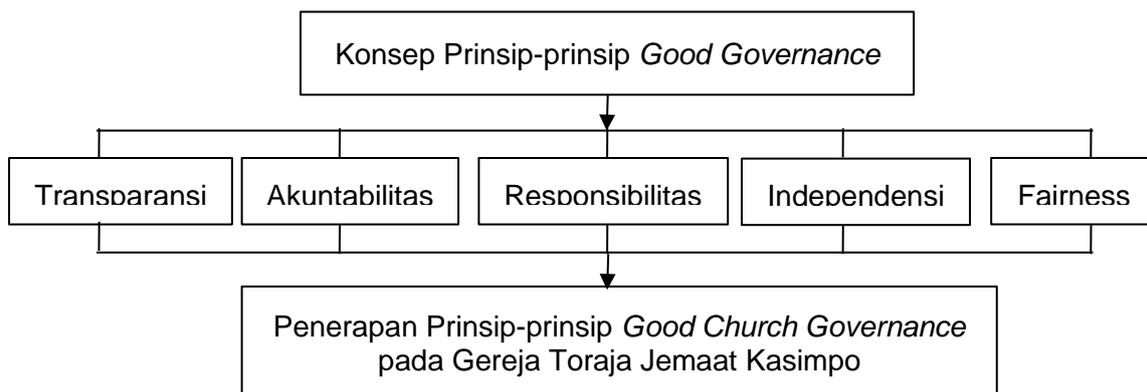
Prinsip	Indikator <i>Good Church Governance</i>
Transparansi	Proses pengambilan keputusan, pengungkapan informasi keuangan, dan pengungkapan informasi program dan kegiatan.
Akuntabilitas	Penguraian tugas dan fungsi organ, pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, pemantauan dan evaluasi kinerja, dan pertanggungjawaban kepemimpinan.

Responsibilitas Pelayanan dan kepedulian sosial, keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan individu dan komunitas, kualitas pelayanan dan pertumbuhan rohani.

Independency Kemandirian keuangan, kebebasan dalam pengambilan keputusan, dan integritas kinerja.

Fairness Proses pengambilan keputusan yang adil, kesetaraan perlakuan, dan akses yang adil terhadap pelayanan dan sarana ibadah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu menyelidiki dan menggambarkan bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good church governance* (GCG) di Gereja Toraja Jemaat Kasimpo. Ada dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dari observasi dan wawancara langsung di lapangan dengan perwakilan jemaat dan Badan Pekerja Majelis Gereja Toraja Jemaat Kasimpo dan data sekunder dari dokumen-dokumen yang tersedia seperti struktur organisasi, warta jemaat, panduan verifikasi, serta laporan keuangan dan pertanggungjawaban gereja. Menurut Miles dan Huberman (1992) ada tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan sampai datanya benar-benar terkumpul. Setelah peneliti mendapatkan data hasil wawancara dari narasumber, peneliti akan memilih, merangkum dan memfokuskan kepada hal-hal yang relevan sesuai dengan penelitian melihat bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Church Governance* di Gereja sesuai dengan indikator prinsip pada tabel diatas. Penelitian ini menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dengan memperhatikan implementasi prinsip-prinsip tata kelola berdasarkan indikator yang telah dibuat, lalu menarik kesimpulan sesuai pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, teknik triangulasi metode melalui wawancara bersama Badan Pekerja Majelis Gereja (pendeta, bendahara, sekretaris, tim verifikasi) dan perwakilan jemaat, observasi pelaksanaan program atau kegiatan gereja, dan dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan validitas data yang didapatkan. Berikut tergambar alur berpikir dalam penelitian ini.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

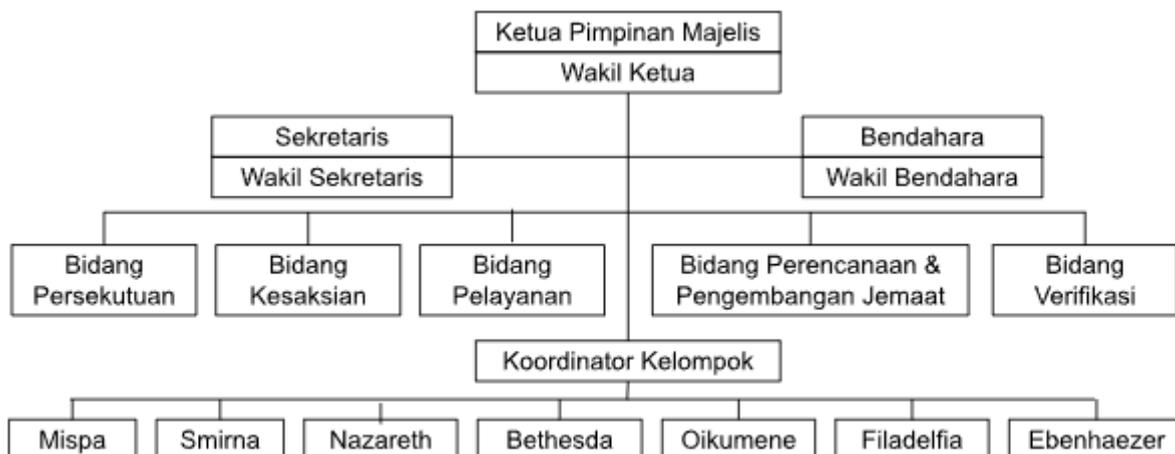
Hasil dan Pembahasan

Gambaran Objek Penelitian

Gereja Toraja adalah organisasi gereja yang menggunakan sistem Presbiterial Sinodal, yang menata pelayanannya dalam lingkup jemaat, klasis, sinode wilayah, dan sinode am (Londong, 2019). Gereja Toraja pertama kali ditetapkan menjadi organisasi gereja pada

25 Maret 1947, dan disahkan dalam Keputusan Menteri Agama pada 11 Mei 1971 yang kemudian terus berkembang hingga saat ini. Pertanggal 13 Juni 2022 Gereja Toraja beranggotakan 1.144 Jemaat yang terbagi dalam 95 Klasis dan dalam 6 Wilayah Pelayanan serta tersebar di 17 propinsi di seluruh Indonesia (Badan Pekerja Sinode, 2022). Gereja Toraja Jemaat Kasimpo merupakan salah satu gereja Toraja di Klasis Makale Kota yang terletak di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pada saat ini di masa periode majelis gereja 2021-2023, Jemaat Kasimpo sudah menetapkan 90 majelis gereja yang diteguhkan pada tanggal 17 Januari 2021 terdiri dari 54 orang Penatua dan 36 Diaken. Jemaat Kasimpo dilayani oleh dua orang pendeta serta mempunyai pegawai tata usaha dan koster berjumlah dua orang tenaga tata usaha, tiga orang koster, dan satu orang tenaga pemeliharaan aset. Kemudian data anggota jemaat per November 2022 tercatat sebanyak 359 kepala keluarga dengan jumlah jemaat 677 jiwa laki-laki dan 664 jiwa perempuan yang dibagi dalam tujuh kelompok pelayanan meliputi kelompok Mizpa, Smirna, Nazareth, Bethesda, Oikumene, Filadelfia dan Ebenhaezer. Mendukung visi misi gereja Toraja pada umumnya, di Gereja Toraja Jemaat Kasimpo membuat proyeksi visi jemaat yaitu "Jemaat Kasimpo yang Misioner".

\ Struktur organisasi yang terbentuk di Gereja Toraja Jemaat Kasimpo dibuat berdasarkan panduan Tata Gereja Toraja yang ditentukan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang kemudian disesuaikan dengan kondisi jemaat. Struktur organisasi yang terbentuk di Jemaat Kasimpo dibagi menjadi dua yaitu struktur Badan Pekerja Majelis (BPM) dan struktur Organisasi Intra Gereja (OIG). Bidang yang terbentuk dalam struktur BPM tersebut meliputi lima bidang yaitu bidang persekutuan, kesaksian, pelayanan, perencanaan & pengembangan jemaat, dan bidang verifikasi. Kemudian pada struktur Organisasi Intra Gereja (OIG) terdiri dari Sekolah Minggu Gereja Toraja (SMGT), Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT), Persekutuan Wanita Gereja Toraja (PWGT), dan Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja (PKBGT) yang memiliki masa periode yang berbeda-beda sesuai panduan OIG dan terbentuk melalui rapat anggota atau sidang yang dilaksanakan. Adapun Tim Perencana Program Pengembangan (TP3) dan Tim Penyelaras Program dan APB Jemaat Kasimpo dibentuk untuk membantu dalam proses perencanaan hingga sampai ditetapkannya program dan anggaran tahunan Gereja Toraja Jemaat Kasimpo. Selanjutnya dalam proses pelaksanaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban struktur dan program kerja dan anggaran (PAK) akan berkaitan dengan Badan Verifikasi Jemaat (BVJ) yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan harta milik Gereja Toraja Jemaat Kasimpo selama satu periode berlangsung.



Gambar 3. 2 Struktur Majelis Gereja Jemaat Kasimpo Periode 2021-2023

Implementasi Prinsip Transparansi

Prinsip Transparansi yang terjadi pada Jemaat Kasimpo sangat tergambar pada rapat awal perencanaan program mengenai penyampaian informasi program dan anggaran tahunan. Rapat perencanaan program ini dihadiri oleh semua Struktur Badan Pekerja Majelis Jemaat Kasimpo, Perwakilan OIG, dan tua-tua jemaat sebagai perwakilan dari Jemaat. Semua keputusan yang berkaitan dengan program dan anggaran akan disampaikan melalui warta jemaat ataupun bentuk tertulis lainnya dan disosialisasikan kepada jemaat jika diperlukan, sebagai contoh sosialisasi keputusan sentralisasi. Hal ini disampaikan oleh Pendeta selaku Ketua Pimpinan Majelis Gereja bahwa:

Keputusan-keputusan itu baik program memang harus disampaikan dan disosialisasikan ke jemaat supaya mereka tahu karena tanpa disampaikan kepada mereka pasti mereka tidak tahu, biasanya dituliskan dalam warta jemaat secara garis besar sedangkan untuk keputusan-keputusan pokok itu disampaikan untuk disosialisasikan ke anggota jemaat.

Dikonfirmasi juga oleh salah satu perwakilan jemaat yang menyatakan “*Semua keputusan yang diambil dapat diketahui oleh jemaat, contohnya keputusan sentralisasi*”. Informasi keuangan jemaat pun sangat rutin diinfokan kepada jemaat setiap minggu dan setiap bulan melalui warta jemaat yang dibagikan setiap minggu atau dapat diakses melalui *website* gereja atau *group-group whatsapp* bendahara. Adapun kartu inventaris ruangan dipajang di setiap ruangan pada gereja dan pastori pendeta sebagai informasi aset gereja apa saja yang dipunya dalam ruangan tersebut. Selanjutnya dalam pelaporan khususnya pelaporan keuangan biasanya ditemukan persembahan yang tidak diketahui siapa penerimanya atau tidak ingin disebut namanya dan hal ini harus tetap dilaporkan dalam laporan keuangan tetapi identitasnya tidak disebut atau diganti dengan istilah “NN”.

Kemudian dalam pertanggungjawaban, pengurus selalu melaporkan hasil kinerjanya di akhir periode melalui laporan pertanggungjawaban yang dapat diakses oleh jemaat atau siapapun yang membutuhkan. Hal ini dikonfirmasi oleh perwakilan jemaat yang menyatakan bahwa “*Semua bentuk tanggung jawab yang sudah dilakukan oleh pengurus ditransparasikan kepada jemaat atau siapa saja yang membutuhkan*”. Adapun hasil dokumentasi laporan pertanggungjawaban berupa rangkuman kegiatan jemaat, ketercapaian dan evaluasi pelaksanaan program kerja, laporan keuangan berupa rencana dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja gereja, hasil temuan-temuan pemeriksaan yang perlu untuk ditindaklanjuti bahkan sampai analisis laporan keuangan Jemaat Kasimpo dalam satu tahun sangat jelas tertulis dan dapat diakses oleh jemaat. Dengan demikian, Ketercapaian prinsip transparansi dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 1 Ketercapaian Indikator Prinsip Transparansi

Prinsip	Indikator	Ketercapaian	Simpulan
Transparansi	Proses pengambilan Keputusan	Jemaat Kasimpo memiliki proses pengambilan keputusan yang transparan dan terbuka dengan melibatkan jemaat.	Memenuhi
	Pengungkapan Informasi Keuangan	Jemaat Kasimpo memiliki kebijakan untuk mengungkapkan informasi keuangan secara transparan kepada anggota jemaatnya dan masyarakat umum.	Memenuhi
	Pengungkapan Informasi	Jemaat Kasimpo mengungkapkan informasi yang jelas tentang program dan kegiatan	Memenuhi

Program dan yang dilakukan, termasuk tujuan, anggaran,
Kegiatan dan dampak yang dicapai.

Implementasi Prinsip Akuntabilitas

Dalam menjalankan setiap fungsi, tugas, dan peranan masing-masing personalia atau bidang dalam struktur BPM dan OIG, tentunya diperlengkapi oleh panduan tertulis maupun pelatihan. Panduan tersebut meliputi Tata Gereja Toraja, buku pedoman pelaksanaan verifikasi di lingkungan Gereja Toraja, pedoman umum pengelolaan keuangan Gereja Toraja, buku uraian tugas Badan Pekerja Majelis (BPM), dan panduan-panduan lainnya yang diatur dari Pengurus Pusat untuk masing-masing OIG di Jemaat. Sebelum melalui tugas pelayanannya akan diberikan pembinaan pemahaman pelatihan tanggung jawab sebagai seorang majelis gereja. Adapun pembagian tugas dan pelayanan di dalam struktur BPM dan OIG akan dipilah dan disesuaikan dengan latar belakang masing-masing anggota. Kemudian pada setiap awal periode setelah ditetapkannya struktur Badan Pekerja Majelis atau OIG, maka akan dilaksanakan pengukuhan pada ibadah peneguhan dengan naskah perjanjian yang akan ditandatangani sebagai komitmen di hadapan Jemaat dan Tuhan untuk dipakai dalam pelayanan. Hal ini disampaikan oleh Pendeta bahwa:

Majelis gereja ada pengukuhan dalam naskah perjanjian sebagai komitmen untuk melayani dalam ibadah peneguhan, disiapkan naskah perjanjian untuk ditandatangani dan sebelum melalui tugas pelayanannya akan diberikan pembinaan pemahaman pelatihan tanggung jawab sebagai seorang majelis gereja. Pengurus juga akan dipilah berdasarkan latar belakang contohnya diaken membantu melayani diakonia dan pelayanan ke jemaat masyarakat sedangkan penatua fokus pelayanan ibadah.

Akuntabilitas juga sangat terlihat dengan pembuatan dan penetapan standar harga barang atau jasa, honorarium standar jaminan hidup pekerja, biaya perjalanan dinas, dan juga rancangan anggaran pembangunan jemaat sebagai panduan dalam penganggaran. Jemaat Kasimpo menggunakan metode basis kas dalam pencatatannya dari tiga metode pencatatan yang ditetapkan oleh panduan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Gereja Toraja (SIK-GT) diantaranya *cash basic*, basis kas modifikasian, dan *basis accrual*. Adapun laporan yang dibuat berdasarkan metode pencatatan ini adalah laporan arus kas (laporan penerimaan persembahan dan pembayaran) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun berdasarkan pedoman umum pengelolaan keuangan dan verifikasi Gereja Toraja seharusnya metode pencatatan yang diterapkan oleh jemaat sudah menggunakan metode basis kas modifikasian atau basis akrual. Badan Verifikasi Jemaat juga berperan dalam memeriksa setiap laporan keuangan yang telah dibuat oleh bendahara jemaat, OIG, kepanitiaan dan kolektor kelompok setiap triwulan. Adapun pemeriksaan yang dilakukan oleh BVJ adalah fokus kepada audit administrasi meliputi laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban beserta lampiran buktinya. Jika ditemukan temuan, maka Badan Verifikasi Jemaat akan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada bendahara yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan BVJ akan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Pimpinan Majelis sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan demikian, ketercapaian prinsip akuntabilitas dapat digambarkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 3. 2 Ketercapaian Indikator Prinsip Akuntabilitas

Prinsip	Indikator	Ketercapaian	Simpulan
Akuntabilitas	Penguraian tugas dan fungsi organ	Jemaat Kasimpo mempunyai pedoman tertulis terkait uraian tugas dan fungsi pimpinan majelis gereja, bidang-bidang dan komisi yang terbentuk pada struktur kemajelisan suatu periode	Memenuhi

Pengelolaan Keuangan yang Bertanggung Jawab	Jemaat Kasimpo memiliki kebijakan dan praktik yang memastikan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Namun penerapan metode pencatatan belum sesuai dengan pedoman Gereja Toraja.	Cukup Memenuhi
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja	Jemaat Kasimpo memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja yang efektif melalui Badan Verifikasi Jemaat dan pelaksanaan evaluasi kinerja dilaksanakan setiap triwulan.	Memenuhi
Pertanggungjaban Kepemimpinan	Kepemimpinan gereja bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawabnya dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program gereja, dan komunikasi yang terbuka dengan anggota jemaat dan masyarakat.	Memenuhi

Implementasi Prinsip Responsibilitas

Menurut pengakuan salah satu perwakilan jemaat bahwa jemaat sangat merasakan dampak yang sangat baik melalui program-program yang telah direncanakan dan berjalan seperti pelaksanaan ibadah tiap minggu, kunjungan diakonia, maupun kegiatan sosial lainnya. Jemaat Kasimpo dalam kepedulian dan kepekaan terhadap jemaat dan masyarakat sekitar diwujudkan pelaksanaan program tim peduli sesama, pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan pendidikan, dan kunjungan ke lembaga pemasyarakatan. Praktik-praktik ramah lingkungan dan kelestarian lingkungan tercermin dari penggunaan bunga hidup untuk menghiasi gedung gereja setiap minggunya dan adanya program pengadaan bibit tanaman. Jemaat Kasimpo juga mendorong pemberdayaan individu dan komunitas melalui program pembekalan majelis gereja dan pelatihan musik gerejawi. Pembelajaran katekisasi diberikan sebagai pemberian pelayanan dan pertumbuhan rohani untuk membina warga jemaat. Sehingga sejauh ini pengurus gereja juga dirasa sudah mampu bertanggungjawab atas tugas dan pelayanan yang diberikan meskipun belum maksimal. Bentuk pertanggungjawaban dari program dan anggaran yang telah dilaksanakan ini dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban satu tahun yang kemudian disampaikan kepada Jemaat. Selanjutnya Badan Verifikasi Jemaat melaporkan juga Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan (LHPP) secara tahunan yang diungkapkan dalam laporan pertanggungjawaban tersebut. Ketercapaian prinsip responsibilitas dapat digambarkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 3. 3 Ketercapaian Indikator Prinsip Responsibilitas

Prinsip	Indikator	Ketercapaian	Simpulan
Responsibilitas	Pelayanan dan Kepedulian Sosial:	Jemaat Kasimpo memiliki program dan kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat sekitar.	Memenuhi
	Keberlanjutan Lingkungan	Jemaat Kasimpo memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan dengan mengadopsi praktik-praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan	Memenuhi
	Pemberdayaan Individu dan Komunitas	Jemaat Kasimpo mendorong pemberdayaan individu dan komunitas melalui pembekalan majelis gereja dan pelatihan musik gerejawi bagi jemaat.	Memenuhi

Kualitas Pelayanan dan Pertumbuhan Rohani	Jemaat pelayanan pertumbuhan rohani	Kasimpo yang berkualitas dan anggota jemaatnya.	mengutamakan dan	Memenuhi
---	-------------------------------------	---	------------------	----------

Implementasi Prinsip Independensi

Gereja Toraja Jemaat Kasimpo dalam kebijakan keuangan memiliki pedoman tersendiri sesuai dengan yang diatur oleh pedoman umum pengelolaan keuangan dan verifikasi Gereja Toraja. Pedoman ini berisikan tentang bagaimana perencanaan, pelaksanaan, pelaporan & pertanggungjawaban, bahkan sampai ketentuan pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh struktur gereja. Observasi yang dilakukan juga pada rapat evaluasi program dan wawancara dengan perwakilan jemaat ditemukan bahwa semua peserta yang hadir dalam rapat baik itu jemaat sendiri sangat diberikan kebebasan dalam berpendapat atau memberikan usulan dari apa yang sedang dipaparkan, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan bersama dan tidak merugikan siapapun. Kemudian pengurus dalam menjalankan perannya dinilai bebas dari intervensi-intervensi tertentu. Begitupun dengan pernyataan yang disampaikan oleh jemaat bahwa jemaat bebas menyatakan kritik saran kepada gereja tanpa didapatinya sebuah tekanan ketika sudah menyampaikan. Kondisi tersebut tentunya berdampak baik juga kepada pengurus sehingga mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan baik tanpa merasa tertekan. Namun dalam pelaksanaan kinerja masih terdapat pengurus yang masih melempar tanggung jawab pelayanan dikarenakan masih ada beberapa yang belum menghayati tugas panggilanNya. Hal ini diungkapkan oleh Pendeta selaku Ketua Pimpinan Majelis yang menyatakan bahwa:

Pengurus dalam melaksanakan perannya belum 100% baik karena masih ada yang belum menghayati tugas pelayanannya itu, tetapi lebih banyak juga yang sudah memahami dan melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. contohnya ada namanya saja tapi tidak melaksanakan pelayanannya. Solusi untuk masalah ini tetap kita sampaikan saling mengingatkan untuk bagaimana aktif dalam kegiatan dan pelayanan kita.

Tabel 3. 4 Ketercapaian Indikator Prinsip *Independency*

Prinsip	Indikator	Ketercapaian	Simpulan
<i>Independency</i>	Kemandirian Keuangan	Jemaat Kasimpo memiliki kebijakan keuangan yang memastikan kemandirian dan kebebasan dalam mengelola sumber daya keuangan gereja sesuai pedoman umum pengelolaan keuangan dan verifikasi Gereja Toraja.	Memenuhi
	Kebebasan dalam Pengambilan Keputusan	Jemaat Kasimpo memiliki mekanisme yang memastikan pengambilan keputusan yang bebas dan independen, terlepas dari tekanan atau pengaruh eksternal yang tidak sesuai dengan nilai dan prinsip gereja.	Memenuhi
	Integritas Kinerja	Pengurus Gereja Toraja Jemaat Kasimpo masih ditemukan beberapa yang melempar tanggung jawab pelayanan satu dengan yang lain.	Belum Memenuhi

Implementasi Prinsip *Fairness*

Setiap keputusan yang diambil menurut pengakuan salah satu jemaat sudah tersampaikan secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan dalam setiap pengambilan keputusan

selalu dihadiri oleh majelis gereja sebagai representasi dari jemaat, OIG, dan tua-tua jemaat khususnya dalam pengambilan keputusan program dan anggaran. Kemudian jika jemaat tidak hadir dalam rapat tersebut informasi keputusan akan disampaikan melalui warta jemaat atau melalui perwakilan jemaat yang hadir. Adapun jika perwakilan jemaat dalam hal ini majelis gereja salah dalam menyampaikan informasi kepada jemaat, pengurus sudah mampu bertanggungjawab dalam meluruskan informasi tersebut. Jemaat juga sudah diberikan kebebasan dalam memberikan pendapat, kritik saran, serta usulan kepada pengurus gereja tanpa melihat latar belakangnya dan juga dalam pelayanan semua jemaat diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang ras, suku, gender, bahkan latar belakang sosial. Jemaat yang ingin memberikan kritik dan saran bisa secara langsung datang ke kantor gereja ataupun dapat menyampaikan melalui nomor kontak Pimpinan Majelis Gereja, Ketua OIG, dan Tata Usaha yang tertera pada warta jemaat setiap minggu. Jemaat juga sangat diharapkan untuk dapat terlibat aktif terhadap pelayanan gereja dan kegiatan-kegiatan gereja yang sudah terprogram. Ketercapaian prinsip *fairness* dapat digambarkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 3. 5 Ketercapaian Indikator Prinsip *Fairness*

Prinsip	Indikator	Ketercapaian	Simpulan
<i>Fairness</i>	Proses Pengambilan Keputusan yang Adil	Jemaat Kasimpo memiliki mekanisme yang memastikan proses pengambilan keputusan yang adil dan transparan.	Memenuhi
	Kesetaraan Perlakuan	Jemaat Kasimpo memperlakukan semua anggota jemaat dengan adil dan setara, tanpa membedakan ras, suku, jenis kelamin, usia, atau latar belakang lainnya.	Memenuhi
	Akses yang Adil terhadap Pelayanan dan Sarana Ibadah:	Jemaat Kasimpo memiliki akses yang adil bagi semua anggota jemaat terhadap pelayanan gereja, fasilitas ibadah, dan program gereja. Tidak ada diskriminasi atau hambatan yang tidak adil dalam memperoleh manfaat dari kegiatan gereja.	Memenuhi

Kesimpulan dan Saran

Penerapan prinsip-prinsip *Good Church Governance* di Gereja Toraja Jemaat Kasimpo berdasarkan indikator yang telah dibuat merujuk pada kajian literatur *Good Governance* dapat disimpulkan secara umum sudah berjalan dengan baik dengan ketercapaian indikator yang hamper memenuhi. Namun pada prinsip akuntabilitas indikator pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab masih dikategorikan cukup memenuhi karena penerapan metode pencatatan laporan keuangan belum dapat mengimplementasikan metode pencatatan basis kas modifikasian atau basis akrual yang disyaratkan berdasarkan panduan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Gereja Toraja dan juga pada prinsip *Independency*, integritas kerja belum memenuhi karena masih ditemukan beberapa pengurus yang melempar tanggung jawab pelayanan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, indikator prinsip *good church governance* dalam penelitian ini dapat menjadi dasar sebagai bahan evaluasi bagi gereja dan dapat meningkatkan loyalitas Jemaat sebagai *stakeholders* kepada kepengurusan Gereja bahwa di Gereja Toraja Jemaat Kasimpo telah mencerminkan penerapan *Good Church Governance* yang tergolong sudah baik.

Penelitian yang telah dilakukan memiliki keterbatasan antara lain pada saat melakukan penelitian bertepatan dengan pengubahan sistem pelaksanaan program dan anggaran menuju sistem sentralisasi sehingga informasi yang didapatkan adalah informasi pada saat

peralihan sistem. Selanjutnya observasi yang dilakukan juga belum maksimal berdasarkan tahapan pembentukan hingga penetapan program dan anggaran karena keterbatasan waktu di tempat penelitian. Adapun saran bagi Gereja Toraja Jemaat Kasimpo yaitu sebaiknya melakukan peninjauan kembali terkait tata gereja, prosedur dan pedoman yang sudah dimiliki sehingga dapat menambahkan hal-hal yang dinilai kurang dan menghilangkan hal-hal yang sudah tidak relevan untuk diterapkan. Beberapa hal yang disarankan antara lain: 1) Metode Pencatatan yang diterapkan berdasarkan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Verifikasi Gereja Toraja pada tingkat jemaat seharusnya sudah menuju metode basis kas modifikasian dengan menghasilkan laporan neraca dan pencatatan yang dilakukan penggabungan antara basis kas dan basis akrual. 2) Mekanisme penyajian laporan keuangan dapat dibuat mengikuti standar ISAK 35 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Peneliti selanjutnya juga sebaiknya dapat memperhatikan waktu agenda gereja jika ingin melakukan observasi secara mendetail khususnya dalam perancangan dan penetapan program dan anggaran serta melakukan *research* lebih mengenai indikator-indikator yang dapat digunakan dalam mengukur *good church governance* pada gereja.

Daftar Pustaka

- Angin, Y. H. P., & Yeniretnowati, T. A. (2022). Good Church Governancedengan Menerapkan Seri ISO 9000 dan Implikasinya bagi Pemimpin Gereja. *Jurnal Teologi Kharismatika*, 5(1), 19–33. <https://doi.org/10.53547/diegesis.v5i1.179>
- Arri, I. (2021). *Gelapkan Uang Gereja Rp289 Juta, Eks Kasir GPIB Maranatha Ditahan Polda Bali*. INews Bali. <https://bali.inews.id/berita/gelapkan-uang-gereja-rp289-juta-eks-kasir-gpib-maranatha-ditahan-polda-bali>
- Badan Pekerja Sinode. (2019). *Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Verifikasi Gereja Toraja* (1st ed.). PT Sulo.
- Badan Pekerja Sinode. (2022). *Sejarah Gereja Toraja*. <https://gerejatoraja.id/profil>
- Burhan, R., & Jamaluddin, afdal kurniawan. (2020). Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Ccg) Terhadap Persepsi Masyarakat Dan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Palopo. *Journal Of Institution And Sharia Finance*, 3(1), 21–50. <https://doi.org/10.24256/joins.v3i1.1442>
- Dzul kifli, M., Furqan, A. C., & Betty, B. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bencana. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(1), 9–18. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.5865>
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B., & de Colle, S. (2010). Stakeholder theory: The state of the art. *Stakeholder Theory: The State of the Art*, 1–343. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511815768>
- Gabriela Mony, T. F., & Suhartini, D. (2022). Analisis tata kelola keuangan pada gereja kristen indonesia merisi indah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 4523–4537. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1750>
- Girsang, B. H. (2022). *Analisis Kelayakan Penerapan Good Governance Pada Organisasi Nonlaba*. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/24669>
- kabartimur. (2018). *Pendeta Dituding Gelapkan Dana Pembangunan Gereja*. Kabartimurnews. <https://www.kabartimurnews.com/2018/07/06/pendeta-dituding-gelapkan-dana-pembangunan-gereja/>
- Kamil, I. (2022). *Ditahan Terkait Kasus Gereja Kingmi Mile 32, KPK Duga Kabag Kestra Mimika Minta "Fee" ke Kontraktor*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/22322651/ditahan-terkait-kasus-gereja-kingmi-mile-32-kpk-duga-kabag-kestra-mimika>
- Kedoh, A. R. D., & Sulindawati, N. L. G. E. (2022). Akuntabilitas Gereja dalam Pandangan Alkitabiah dan Stewardship Theory di GKPB Kasih Karunia Sambilan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Jumanika*, 12(2), 385–394.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v12i2.41559>
- KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Kustina, K. T., & Sujana, N. P. H. H. (2019). Mengungkap Praktik Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Organisasi Tradisional Subak (Studi Pada Subak Teba Mengwi Bali). *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 14(1), 9–21. <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/687>
- Londong, J. P. (2019). Pemaknaan Good Corporate Governance Dalam Mewujudkan Tri Panggilan Gereja (Bersaksi, Bersekutu, Melayani). *Paulus Journal Of Accounting (PJA)*, 1, 42–50. <https://doi.org/10.34207/pja.v1i1.84>
- Maria, M., Dwirandra, A. A. N. B., Sujana, I. K., & Budiarta, I. K. (2022). Akuntabilitas Pada Organisasi Berorientasi Nonlaba Gereja Di Masa Pandemi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(07), 789. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i07.p04>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif : buku sumber tentang metode metode baru*. Universitas Indonesia (UI-Press). <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=298242>
- Munte, M., & Dongoran, D. (2019). Impact of Transparency and Accountability of Church Financial Reporting on the Interest of Members' Church Giving Donations to Church. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3439838>
- Muslih, M., Delfira, A., Silalahi, M. U., & Amelia, T. R. (2021). Tata Kelola Gereja Pada Gereja Bethel Indonesia (Gbi) Rawa Kalong. *Jurnal Pengabdian Masyarakat TRI PAMAS*, 3(2), 101–117.
- Pisteo, R., Sugianto, F., & Agustian, S. L. (2020). Pemaknaan Kembali Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2630>
- Prodjowijono, S. (2008). *Manajemen Gereja Sebuah Alternatif* (1st ed.). BPK Gunung Mulia.
- Qomariyah, L., & Sulistyowati, E. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi pada Yayasan YPI Darussalam Cerme). *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, 5(1). <https://www.ejournal.kompetif.com/index.php/akuntansikompetif/article/view/834/576>
- Sudarmanto, E., Susanti, E., Erika, R., Faisal, M., Purba, S., Purba, A., Sipayung, M., & Krisnawati, A. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)* (A. Karim & S. Janner (eds.)). Yayasan Kita Menulis.
- Suhendri, H., & Iriani, N. I. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Keagamaan Pada Gereja GPDI Gloria Malang. *Jurnal Cakrawala*, (2), 21–38.
- Tjungadi, M. A. H., & Rahadian, Y. (2020). Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Internal pada Gereja Toraja ABC. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(2), 241–264. <https://doi.org/10.17509/jaset.v12i2.24583>